PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG

**RETRIBUSI PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET
DI LUAR KAWASAN HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi yang cukup besar sebagai penghasil Sarang Burung Walet, yang pada satu sisi dapat meningkatkan pendapatan pengelolaannya karena memiliki nilai ekonomis tinggi, namun pada sisi lain pemanfaatan burung walet khususnya di luar kawasan hutan dapat berpengaruh terhadap terganggunya keseimbangan populasi atau kelestarian burung walet dari habitat asalnya serta dapat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan masyarakat sekitarnya;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatannya dengan baik dan tertib diperlukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah. Serta dalam rangka upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu mengatur pemanfaatan sarang burung walet dalam Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan membentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 10910 sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara nomor 3204);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan

- Kabupaten daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara nomor 3825);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pemeintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan anatar Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara nomor 3258);
 9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara nomor 3888);
 10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara nomor 4048); Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
 16. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 449/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Pengelolaan Burung Walet (Collocalia) di Habitat Alami (In-situ) dan Habitat Buatan (Ex-Situ);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 18. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449 / KPTS-II / 1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Pengelolaan Burung Walet (collocalia di Habitat Alami (In-Situ) dan Habitat Buatan (Ex-Situ);
 19. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai daerah Otonom.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN SARANG BURUNG
WALET DI LUAR KAWASAN HUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Tengah adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah,
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
8. Perizinan adalah suatu ketentuan tertulis yang sah, dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk kepentingan orang pribadi atau badan dalam melaksanakan sesuatu kegiatan, yang sekaligus memuat ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Pribadi atau badan;
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT , adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDL, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keutusan atas keberatan terhadapSKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
19. Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk marga Collocalia;
20. Pengelolaan Burung walet adalah upaya pembinaan habitat dan populasi burung walet di habitat alami (in-situ) maupun habitat buatan (ex-situ);
21. Habitat Alami (In –Situ) Burung Walet adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan;
22. Habitat Buatan (Ex-Situ) Burung Walet adalah bangunan sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak;
23. Sarang Burung Waket adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat bersarang dan bertelur serta menetas anakan burung walet;
24. Pemanfaatan Burung Walet adalah suatu kegiatan pengelolaan burung walet dalam rangka memanfaatkan sarang burung walet;
25. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami mupun habitat buatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat serta populasi burung walet di habitat alaminya;
26. Panen Rampasan adalah sisitem pemanenan sarang burung walet yang dilakukan pada saat burung walet sempurna dibuat dan belum berisi telur;
27. Panen Tetesan adalah sistem pemanenan sarang burung walet yang dilakukan setelah anakan burung walet menetas dan sudah bisa terbang dan mencari makan sendiri;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
29. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
30. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemanfaatan usaha produksi sarang burung walet di luar Kawasan Hutan dipungut retribusi.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah sarang burung walet.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pemanfaatan sarang burung walet.

Pasal 5

Retribusi pemanfaatan sarang burung walet digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB III PENGENAAN RETRIBUSI, TATA CARA MEMPEROLEH IZIN DAN MASA PERIZINAN

Bagian Pertama Pengenaan Retribusi

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan sarang burung walet, dikenakan pungutan retribusi sesuai laporan hasil panennya secara berkala
- (2) Dokumen pungutan retribusi sekaligus merupakan dokumen penyertaan angkutan atau mutasi sarang burung walet dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah
- (3) Pengangkutan atau mutasi sarang burung walet keluar wilayah propinsi, harus disertai dokumen angkutan khusus model Depertemen Kehutanan.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan sarang burung di luar kawasan hutan harus memperoleh izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Membuat Surat Permohonan (bermaterai/segel); disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
 - b. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang asli, beserta 3 (tiga) lembar fity copy;